



Analisis Dampak Penolakan Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera*

Alya Chiata Kurnia Sukma Prakoro,¹ Ridwan²
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta



[10.15408/sjsbs.v10i5.34109](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.34109)

Abstract

This study aims to analyze the impact of resistance against the Jakarta Bay reclamation policy by the Prosperous Justice Party (PKS) faction because basically political party decisions are based on various organizational considerations by paying attention to various aspects, including political order (political constellation), mass support base to ideology and orientation party, while the impact caused by the party's policies can be in the form of various things that have been planned or unplanned impacts. This research is driven by using several relevant approaches (concepts/theories) including elite theory according to Vilfredo Pareto, policy theory according to Heinz and Prewit, the concept of political party ideology according to Cole, as well as the concept of policy impact and the concept of policy peace according to Prabuningrat and Darwin. This research uses a descriptive descriptive research method with primary and secondary data sources. Interview data collection techniques and literature review in the form of books, news, and previous research journals that are relevant to this research. This research shows that the impact of resistance against the Jakarta Bay reclamation policy by the Prosperous Justice Party (PKS) faction was the worsening of the relationship between the PKS faction and the executive (the government of DKI Jakarta), the emergence of polarization of interests within the DPRD DKI Jakarta internally, and the subsequent impact of conflict of interest between grassroots communities. and business groups.

Keywords: Jakarta Bay; Reclamation; PKS Rejection.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak penolakan kebijakan reklamasi Teluk Jakarta oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena pada dasarnya keputusan partai politik didasarkan pada berbagai pertimbangan organisasi dengan memperhatikan berbagai aspek, diantaranya tatanan politik (*political constelations*), basis massa pendukung hingga ideologi dan orientasi partai, sedangkan dampak yang diakibatkan oleh kebijakan partai tersebut dapat berupa berbagai hal yang telah direncanakan ataupun dampak yang tidak direncanakan. Penelitian ini dijalankan dengan menggunakan beberapa pendekatan (konsep/teori) yang relevan diantaranya teori elit menurut Vilfredo Pareto, teori kebijakan menurut Heinz and Prewit, konsep ideologi partai politik menurut Cole, serta konsep dampakkebijakan dan konsep penolakan kebijakan menurut Prabuningrat dan Darwin. Penelitian ini menggunakan metode peneitian kualitatif deskriptif dengan sumber data

*Diterima: 21 Juni 2023, Revisi: 27 Juli 2023, Diterbitkan: 30 Oktober 2023

¹ Alya Chiata Kurnia Sukma Prakoro adalah dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Email: Alyachiata3@gmail.com

² Ridwan adalah dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Email: Ridwan.fisip@upnvj.ac.id

primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka berupa buku, berita, dan jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan dampak penolakan kebijakan reklamasi Teluk Jakarta oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah memburuknya hubungan fraksi PKS dengan pihak eksekutif (pemerintah DKI Jakarta), munculnya polarisasi kepentingan di internal DPRD DKI Jakarta, serta dampak selanjutnya terjadinya konflik kepentingan antara masyarakat *grass roots* dan kelompok bisnis

Kata Kunci: Reklamasi; Teluk Jakarta; Penolakan PKS

A. PENDAHULUAN

Kebijakan publik memiliki makna penting untuk mengatur kehidupan masyarakat pada suatu negara melalui tatanan dan regulasi yang jelas. Penerapan kebijakan publik pada negara demokrasi terkadang dihadapkan pada berbagai hambatan, baik secara fungsional atau teknis hingga hambatan yang berasal dari masyarakat yang menolak kebijakan tersebut. Indonesia memiliki beberapa jenis kebijakan publik diantaranya kebijakan publik substantif, distributif, material dan barang publik.³

Kebijakan reklamasi sendiri adalah bagian dari kebijakan pemerintah dengan menjadikan masyarakat sebagai obyek kebijakan untuk kemudian dikelola dan diatur sesuai dengan ketentuan yang adanyaitu diterbitkannya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 yang menjelaskan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan reklamasi memberikan dampak dalam aspek sosial-politik karena menyangkut beberapa alasan pertama, kebijakan reklamasi berkaitan dengan pemindahan penduduk secara massal dalam jumlah besar, kedua, kebijakan reklamasi seringkali menjadi persoalan yang dilematis karena berhubungan dengan dampak terhadap lingkungan yang bukan saja berkaitan dengan lingkungan hidup, namun juga kehidupan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya terhadap lingkungan dan ketiga, kebijakan reklamasi seringkali menyebabkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat yang kemudian menimbulkan perpecahan secara kolektif antara kubu masyarakat. Kebijakan reklamasi diperlukan karena alasan tertentu, diantaranya adanya kebutuhan lahan di wilayah tertentu, adanya grand design tata kota, pengembangan kompleks industrialisasi dan lain-lainnya. Kebijakan ini dijalankan melalui penimbunan (*reclaiming land*) pada wilayah yang telah direncanakan sebelumnya.⁴

Reklamasi Teluk Jakarta merupakan kebijakan pemerintah yang menimbulkan berbagai macam reaksi pro dan kontra. Tahun 1995 proyek ini dicanangkan yang ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 52 Tahun 1995 meliputi reklamasi pantai utara Jakarta yang terdiri dari 14 pasal yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 13 Juli 1995, namun keluarnya Peraturan Gubernur

³ Dunn, William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), h. 9-10.

⁴ Bennington, Charles E and William B. Porter, *Groundwater Reserach and Issue*, (London: Nova Science Publishing, 2008,), h. 46.

Nomor 58 Tahun 2018 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja badan koordinasi dan pengelolaan reklamasi pantai utara Jakarta yang terdiri dari 15 pasal yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan pada tanggal 4 Juni 2018 ini membatalkan adanya reklamasi di Teluk Jakarta.⁵

Proyek reklamasi Teluk Jakarta terlepas dari adanya politik, di manaterdapat banyak pihak yang mendukung, namun banyak juga pihak yang menolak, bahkan konflik ini telah berkembang pada tingkat kepala daerah dan kementerian yaitu ketika diterbitkannya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 52 Tahun 1995 dibatalkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2018. Persoalan konflik antarinstansi lainnya adalah diterbitkannya surat keputusan (SK) Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang AMDAL dan potensi kerusakan ekosistem Teluk Jakarta.⁶

Konflik reklamasi Teluk Jakarta juga dapat dilihat dari aksi penolakan masyarakat, beberapa kasus diantaranya ada aksi demonstrasi Aliansi Korban Reklamasi (AKR) pada Oktober 2017 di Balai Kota Jakarta. Aksi-aksi serupa yang berlangsung pada 8 November 2018 yaitu aksi demonstrasi yang dilakukan oleh aliansi nelayan dan mahasiswa yang berdemonstrasi secara intensif di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Juni dan tempat-tempat lainnya.⁷

Kasus penolakan terhadap kebijakan reklamasi Teluk Jakarta terjadi karena beberapa pertimbangan, diantaranya berpotensi pada kerusakan lingkungan, hingga dampak sosial berupa hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir Jakarta. Pihak yang menolak kebijakan reklamasi, beberapa diantaranya organisasi masyarakat, seperti Gerakan Nasional Tolak Reklamasi (Gentar), Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) dan elemen-elemen lainnya ataupun tokoh-tokoh politik, sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Alam, Rizal Ramli dan beberapa tokoh nasional lainnya.⁸

Kasus reklamasi Teluk Jakarta yang menjadi perhatian masyarakat, kelas menengah hingga elit politik kemudian menjadi juga menarik perhatian dari partai politik. Terdapat partai politik pendukung kebijakan dan juga terdapat kelompok yang menentang kebijakan reklamasi tersebut. PKS (Partai Keadilan Sejahtera) merupakan partai politik yang ikut menolak kebijakan reklamasi tersebut. PKS merupakan partai politik yang berdiri pada 20 Juli 1998 di Jakarta, sebelumnya PKS bernama Partai Keadilan. Partai ini berideologi Pancasila, Islamisme dan konservatisme sosial dengan menjadikan posisi politik sayap kanan dan kanan jauh. Makna ini menandakan bahwa PKS menjadi partai nasionalis liberalis, bukan sebagai partai kiri atau sosialis-komunis. Kasus program reklamasi di Teluk Jakarta, keberadaan PKS sebagai partai baru memiliki dampak yang kuat dalam konstelasi politik nasional dan konstelasi politik di daerah DKI Jakarta yang pada masa itu muncul kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau

⁵ Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

⁶ Setiaji, *Jejak Suram Reklamasi Jakarta: Dari Politik Sampai Kasus Suap*, (Jakarta: Intermedia, 2019)

⁷ Yulawati, Lis. *Tolak Reklamasi Teluk Jakarta, Pilihan Nelayan Demo di PTUN*, (Jakarta: Intermedia, 2022).

⁸ Yulawati, Lis. *Tolak Reklamasi Teluk Jakarta, Pilihan Nelayan Demo di PTUN*.

Ahok, yang bertransformasi pada kepemimpinan Anis Baswedan sebagai dua Gubernur yang masing-masing memiliki basis masa pendukung yang umumnya saling berseberangan dan keberadaan PKS lebih mendukung pihak Anis Baswedan karena adanya persamaan visi politik, basis massadan ideologi. Pemilu legislatif DKI Jakarta tahun 2019, PKS berhasil mengumpulkan sebanyak 16 kursi atau menduduki peringkat ketiga setelah PDI-Perjuangan dan Gerindra. Menunjukkan bahwa PKS mampu menjadi kekuatan potensial dalam kerangka bargain position terhadap pemerintah, termasuk pada kebijakan penolakan reklamasi di Teluk Jakarta.

PKS sendiri menganggap bahwa program reklamasi Teluk Jakarta masih menghadapi persoalan hukum yang belum selesai, yaitu adanya persoalan tentang tumpang-tindihnya kewenangan antarinstansi. Politis penolakan ini, bukan semata-mata sebagai sikap politik berkaitan dengan posisi PKS sebagai oposisi pemerintah, namun lebih dari itu kebijakan penolakan reklamasi ini bukan sekedar eforia politik, lebih memiliki pertimbangan dan latar belakang yang kuat kemudian teraktualisasi dalam sikap politik PKS dalam menolak kebijakan reklamasi Teluk Jakarta tersebut. Dari latar belakang tersebut, penulis ingin menganalisis, bagaimana dampak penolakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan pendekatan tekstual. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang dampak penolakan kebijakan reklamasi Teluk Jakarta oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Metode ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi pandangan, keyakinan, dan persepsi para pemangku kebijakan terkait dengan isu tersebut. Penelitian kualitatif cenderung menghasilkan data deskriptif, kontekstual, dan mendalam. Dalam konteks ini, data dapat mencakup pandangan anggota fraksi, alasan penolakan, serta pemahaman mereka terkait dampak-dampak yang diidentifikasi.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dampak penolakan kebijakan reklamasi Teluk Jakarta oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menjadi fenomena sosial-politik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dikaitkan dengan proposisi Vilfredo Pareto tentang teori elit menekankan bahwa dalam konstelasi politik dalam dan luar negeri terdapat sekelompok orang yang memiliki kepiawaian dan kualitas-kualitas khusus, sehingga dapat memiliki kekuasaan secara penuh. Inilah yang disebut dengan elit politik. Terkadang kelompok ini menjalankan berbagai taktik dan strategi yang licik dan menghalalkan segala cara, namun terdapat juga kelompok elit yang memang berupaya mewujudkan berbagai pencapaiannya dengan menjembatani kepentingan masyarakat dan kemudian meraihnya dalam tindakan-tindakan yang konstitusional.⁹

⁹ Varma, SP. *Teori Politik Moderen*, (Jakarta : PT. Rajawali Press, 2003), h.19

Vilfredo Pareto juga menyatakan bahwa elit politik berhasil menduduki posisinya dan kemudian berhasil memposisikan diri dalam stratatertinggi, baik dengan memimpin ataupun tidak memimpin karena berhasil menyingkirkan kelompok masyarakat lainnya. Keberadaan elit politik kemudian mamou mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan yang mengikat pada seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, elit politik merupakan kelompok masyarakat yang menguasai, sedangkan lapisan masyarakat lainnya merupakan kelompok yang dikuasai.¹⁰

Dampak penolakan kebijakan reklamasi Teluk Jakarta oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menjadi fenomena sosial politik yang juga relevan dengan proposisi tentang implementasi kebijakan. David Easton menyatakan bahwa pada prinsipnya kebijakan terdiri dari kumpulandari konsep dan asas yang dirumuskan oleh rezim dan suatu kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi yang dimaksudkan sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.¹¹ Penerapan kebijakan memiliki beberapa mekanisme penting sebagai penyaluran dari momentum politik yang keberadaannya saling mempengaruhi. Beberapa faktor ini yaitu: a). Dalam penerapan terdapat beberapa sifat-sifat identifikasi yang membentuk unit dan batas-batas darirana kebijakan itu sendiri; b). Penerapan kebijakan terdapat adanya input (pemasukan) dan output (pengeluaran); c). Penerapan kebijakan terdapat pembedaan di dalam system; c). Penerapan kebijakan terdapat integrasi di dalam sistem.

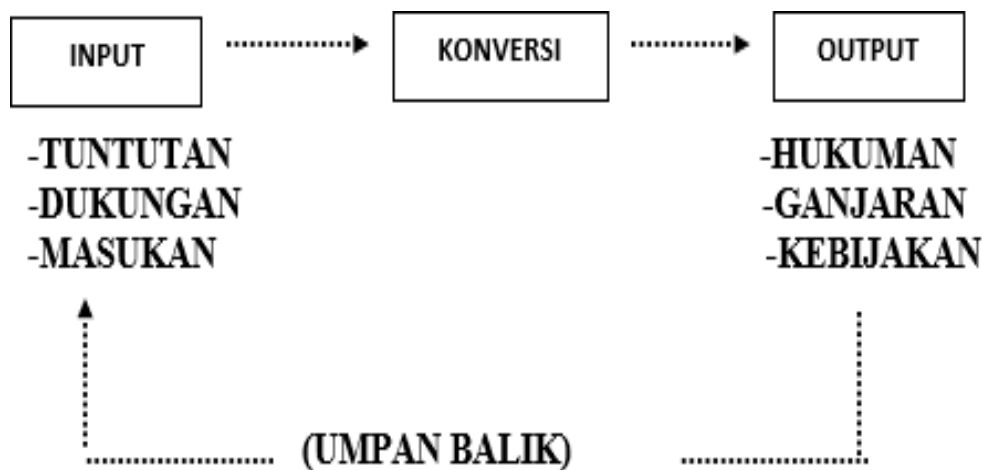
Implementasi kebijakan menjelaskan tentang keputusan- keputusan yang mengikat terhadap masyarakat akibat adanya tindakan- tindakan politik yang dibuat oleh pembuat kebijakan (*Decisions Making*), atas analisa unit-unit politik (input). Input dalam bentuk permintaan dan dukungan menjadi masukan dalam sistem politik, sedangkan output merupakan tindakan atau keputusan politik, antara input dan output melalui umpan balik (*feed back*) yaitu lingkungan. Implementasi kebijakan merupakan hasil rumusan yang dicapai atas berbagai pertimbangan sistematis dan empiris dengan melibatkan berbagai hal dan disinilah implementasi kebijakan diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan yang terjadi ataupun dapat juga merubah suatu kondisi agar berkembang lebih baik di masa yang akan datang.

Skema 1

Bagan Teori Sistem Menurut David Easton

¹⁰ Varma, SP. *Teori Politik Moderen*.

¹¹ David Easton and Luigi Garciario, *The Development of Political Science : A Comparative Survey*, (London and New York : Routledge Publishing, 2002, h.200-202.



Sumber: Diolah dari David Easton, 2002, h.200-202.

Skema diatas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah, partai politik, kelas menengah ataupun stakeholder lainnya bukan merupakan persoalan yang eforia, namun dipengaruhi oleh faktor eksternal sebagai masukan (input) dan kemudian menjadi pemikiran dan berakhir pada diaktualisasikan dan diimplementasikan suatu kebijakan. Adapun kebijakan ini pasca diimplementasikan akan mengalami evaluasi dan pembaharuan sebagai feed back (umpan balik). Salah satu faktor penting yang mempengaruhi suatu kebijakan adalah ideologi.

Kathleen Knight mengungkapkan disalah satu risetnya bahwa penggunaan istilah ideologi dalam artikel-artikel politik cenderung beranjak tinggi. Makna etimologi, ideologi dapat dikatakan mengacu pada apa yang orang pikirkan dan percayamengeni masyarakat, kekuasaan, hak, tujuan kelompok, yang kesemuanya menentukan jenis tindakan mereka. Ideologi berpengaruh terhadap tindakan politik tertentu, juga orang berpikiran dan percaya mengenai masyarakat ini dapat berkisar pada bidang ekonomi, politik, sosial, dan filosofis.¹²

Ideologi pun dapat mengambil akar dari agama, contohnya liberalisme, yang banyak memperoleh inspirasi dari reformasi agama Kristen yang dibawa oleh Martin Luther abad ke-16. Liberalisme cenderung berfokus pada dimensi sekular, walaupun memiliki inspirasi dari agama, pada perkembangannya, khususnya gagasan-gagasan mengenai kemanusiaan, individualitas manusia, dan pembatasan kekuasaan negara atas individu.

Ideologi berakar dari kondisi ekonomi dengan cara produksi manusia, penguasaan alat produksi, tujuan produksi, melahirkan sejumlah ideologi seperti Kapitalisme dan Komunisme. Dua ideologi tersebut memiliki akar yang kuat dari kondisi ekonomi di Eropa tahun 1800-an. Terry Eagleton dalam bukunya *Ideology: An Introduction* merangkum pengertian-pengertian ideologi yang biasa digunakan para

¹² Christopen H Achen and Larry M. Bartels, *Democracy for Realist : Why Eceleation Produce Do Not Responsive Government*, (London : Princenton University Press, 2017), h.49.

penulis politik sebagai proses penggunaan alat produksi yang dimaknai sebagai simbol dan nilai-nilai dalam kehidupan sosial, sebagai gagasan yang digunakan untuk melegitimasi kekuasaan politik dominan, sebagai seperangkat kepercayaan yang diorientasikan kepada tindakan, serta sebagai suatu proses dengan mana kehidupan sosial dikonversikan ke dalam kenyataan alamiah.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu persoalan secara empiris memiliki dampak yang dapat dikategorikan menjadi dua hal besar, yaitu pertama dampak positif dari suatu kebijakan ketika dapat diterima oleh masyarakat yang kemudian menghasilkan berbagai capaian yang sejalan dengan penyelesaian persoalan tersebut dan dampak negatif yaitu dampak dari suatu kebijakan ketika masyarakat menolak dan kemudian menentang berbagai hasil dan capaian atas kebijakan tersebut. Perpecahan atau cumulative cleavages maka kebijakan publik tersebut memerlukan perubahan sehingga ini melahirkan dampak kebijakan yang buruk, kemudian ketika pencapaian kebijakan publik memenuhi kriteria pemerintah dan juga perubahan nilai di masyarakat, namun tetap menyisakan keberhasilan atau sum a sum dan implementasi kebijakan ini memerlukan adanya evaluasi, sedangkan kebijakan yang berhasil diterapkan di masyarakat sesuai dengan kriteria pemerintah dan di apresiasi oleh masyarakat maka kebijakan ini dapat dilanjutkan.¹³

Dampak atas implementasi kebijakan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:¹⁴

- a. Formulai Tujuan. Dampak dari kebijakan memerlukan rumusan kebijakan yang bersifat sistematis, jelas, sistematis dan terukur. terselesaikannya persoalan akan sesuai dengan *political will* yang telah direncanakan tanpa adanya perpecahan, meskipun tetap memerlukan berbagai evaluasi.
- b. Penentuan Kriteria. Dampak dari kebijakan memerlukan penentuan kriteria yang di dalamnya terdapat konsistensi dan adanya pilihan atau alternatif dan memerlukan efisiensi, konsensus antara stakeholder dan berbagai pemenuhan atas administratif.

Penolakan kebijakan merupakan hal yang lazim pada dinamika politik suatu negara pada era demokrasi. Sistem kepartaian penolakan kebijakan menjadi patem (pola) tentang adanya partai pendukung dan partai oposisi. Keberadaan partai oposisi tidak hanya menjadi kontrol dari pemerintah, tapi bisa menjadi wadah bagi aspirasi konstituen dan basis massa pendukungnya untuk menyuarakan dan menolak atas implementasi kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya.

Implementasi kebijakan menjadi bagian penting dalam diskursus studi politik. Implementasi kebijakan mengindikasikan adanya hubungan antara stakeholder dengan masyarakatnya sebagai obyek kebijakan dan kemudian dari disinilah muncul ide,

¹³ Christophen H Achen and Larry M. Bartels, h.49-50.

¹⁴ Wibawa S dan Y. Prabuningrat, *Kebijakan Publik dan Analisis*, (Jakarta: Intermedia, 1994), h.76

gagasan dan berbagai inisiatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang pada kalangan masyarakat. Implementasi kebijakan terdapat berbagai kendala yang dapat berasal dari dalam ataupun dari luar spektrum kebijakan itu sendiri yang kemudian hal ini berperan sebagai penghambat implementasi kebijakan itu sendiri.

Pada dasarnya kebijakan akan kembali lagi pada masyarakat itu sendiri. Ketika terdapat kesalahan konsepsi maka kebijakan tersebut akan mengalami evaluasi dan ketika kebijakan merupakan bentuk kesalahan, maka masyarakat akan menolak melalui aksi konstitusional ataupun non-konstitusional. Hal ini akan menjadi anti klimaks dari kebijakan itu sendiri ketika masuk dalam ranah pihak-pihak yang memposisikan diri sebagai oposisi.

Pemilih sendiri pada dasarnya cenderung mengikatkan diri pada satu partai apabila memang partai tersebut telah terbukti mampu menjaga hubungan jangka panjang. Pemilih akan melihat konsistensi partai politik dalam mewakili ideologi dan memperjelaskan apa yang mereka punya. Partai politik justru mengecewakan para pemilih dan pendukungnya, sehingga menimbulkan sikap kritis untuk berfikir ulang dalam menentukan pilihannya tersebut. Salah satu penyebab munculnya massa mengambang atau bahkan juga kelompok masyarakat yang disebut sebagai golongan putih (golput), berdampak lebih parah karena akan dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik untuk menghancurkan reputasi partai politik bersangkutan. Partai politik sangat penting dalam menepati janji, program kerja, dan harapan yang telah diberikan kepada masyarakat.

Program reklamasi Teluk Jakarta menjadi proyek prestisius yang mampu menarik perhatian, bukan masyarakat DKI Jakarta, namun juga masyarakat di Indonesia. Proyek yang telah dirintis pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto di tahun 1995 dan terus bertransformasi pada rezim-rezim selanjutnya, diantaranya rezim Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo. Program reklamasi Teluk Jakarta masih menyisakan beberapa persoalan berkaitan dengan adanya pihak-pihak yang tidak menerima kebijakan publik ini.

Pada tahun 2016 persoalan reklamasi mengenai pro-kontra reklamasi ini kembali mengemuka dengan adanya partai politik yang menolak, yaitu PKS. Keputusan PKS ini kemudian menyebabkan berbagai dampak politik, diantaranya memburuknya hubungan dengan pihak eksekutif (Pemda DKI Jakarta), polarisasi kepentingan di DPRD DKI Jakarta, serta adanya konflik kepentingan antara masyarakat dan kelompok bisnis.

Reklamasi Teluk Jakarta dijalankan berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil beserta perubahannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 dalam Pasal 1 butir 23 menyebutkan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Peraturan ini dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) menentukan bahwa Reklamasi di wilayah pesisir hanya boleh dilakukan apabila manfaat sosial dan ekonomi yang

diperoleh lebih besar daripada biaya sosial dan biaya ekonominya. 2. Bahwa amanat dan penjelasan undang-undang diatas jelas bahwa reklamasi harus memberikan manfaat sosial dan ekonomi, tetapi bukan hanya ekonomi finansial semata. Tetapi juga harus memberikan manfaat sosial, manfaat sosial adalah suatu kondisi dimana masyarakat dalam segala lapisan merasaterbantu dan merasakan manfaat dalam segala sendi kehidupan baik secara langsung dan tidak langsung dengan hadirnya reklamasi pantai yang dilakukan.¹⁵

Penolakan partai politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kebijakan program reklamasi Teluk Jakarta menjadi fenomena yang lazim terjadi dalam negara demokrasi. Penolakan ini didasarkan pada beberapa hal, diantaranya posisi PKS sebagai oposisi pemerintah daerah di DKI Jakarta dan dalam lingkup nasional. Selain itu, PKS memiliki basis massa yang khas yaitu kelompok masyarakat religius dan moderat yang memandang bahwa kebijakan reklamasi tersebut memiliki banyak kerugian bagi masyarakat bawah (*grass root society*), kerugian akibat kerusakan terhadap lingkungan dan kerugian sosial-ekonomi bagi masyarakat dan lain-lainnya.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengkritik pembangunan di Jakarta yang hanya dikuasai sekelompok elite. Sohibul Iman menegaskan, pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno harus membangkitkan rasa memiliki ibukota Jakarta sebagai milik bersama, bukan milik segelintir orang apalagi asing. Selengkapnya Sohibul Iman menyatakan bahwa:

"...Jakarta milik bersama, karena itu, misalnya pantai utara Jakarta itu adalah ruang publik. Kalau kita bersama maka kalau di sana diadakan reklamasi dibangun perumahan elite artinya Jakarta bukan lagi milik bersama. Ini tidak baik, karena itu kita ingin kembalikan ruang-ruang publik itu, karena itu milik kita bersama,"¹⁶

Sohibul Iman memaparkan, yang ketiga adalah rasa saling percaya diantara sesama. Dengan pihak manapun, meskipun berbeda partai, suku, agama, selama masih warga Jakarta dan warga negara Indonesia. Dengan demikian, PKS berupaya menunjukkan sikap tegasnya untuk menunjukkan bahwa reklamasi dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh sekelompok orang saja, sehingga PKS secara sah dan meyakinkan menolak kebijakan reklamasi Teluk Jakarta tersebut.

Kontroversi dan penolakan PKS terhadap kebijakan reklamasi juga berkaitan dengan adanya dua ketentuan hukum itu, mengakibatkan segala aturan mengenai reklamasi tidak dapat dijadikan dasar bagi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk melanjutkan reklamasi, sehingga PKS meminta Menko Maritim juga jangan terlalu tergesa-gesa memberikan jaminan proyek reklamasi tetap dilanjutkan.

Dampak penolakan PKS terhadap kebijakan reklamasi Teluk Jakarta pada penelitian berkaitan dengan terganggunya hubungan PKS dengan eksekutif yang ditandai dengan terganggunya hubungan partainya ini dengan pihak eksekutif (pemerintah DKI) yang ditandai dengan pernyataan dan sikap-sikap dalam pembuatan

¹⁵ Thea, Ady. *Mau Hentikan Reklamasi : Begini Opsi Hukum Versus Koalisi*, (Jakarta: Intermedia, 2022)

¹⁶ Imam, *Hentikan Sementara Reklamasi di Utara Jakarta* (Jakarta: Intermedia, 2022)

kebijakan yang berseberangan. Dampak selanjutnya adalah polarisasi kepentingan di DPRD DKI Jakarta akibat segregasi atau pemisahan antara PKS sebagai oposisi dan partai-partai pendukung reklamasi. Kemudian dampak terakhir adalah terjadinya konflik pada akar rumput karena adanya sikap PKS ini sejalan dengan sebagian kecil masyarakat yang menjadi korban reklamasi sehingga kelompok ini memiliki kekuatan moral untuk melawan dominasi dari para pengusaha yang terlibat reklamasi tersebut.

Terganggunya hubungan PKS dengan pemerintah DKI (esekutif) dapat dilihat dari beberapa kasus, seperti halnya perseteruan antara pemerintah DKI dan PKS pada 14 September 2016 bahwa pemerintah DKI Jakarta memastikan untuk terus menjalankan reklamasi di Pulau G, namun pihak PKS sebaliknya, bahkan dalam forum pembicaraan ini menyebabkan fraksi PKS melakukan walk out dari forum. Terganggunya hubungan PKS dengan pemerintah DKI juga ditandai dengan adanya perdebatan tentang AMDAL. Bagi PKS yang di dukung oleh WALHI menyatakan bahwa pemerintah DKI tidak cukup lengkap dalam memenuhi AMDAL, namun nurut Kementerian Kemaritiman justru sebaliknya yang menyatakan bahwa reklamasi layak untuk dijalankan. Kondisi ini kemudian berakhir dengan *dead lock*.¹⁷

Polarisasi kepentingan akibat penolakan PKS terhadap kebijakan reklamasi Teluk Jakarta menunjukkan sulitnya penyelesaian proyek reklamasi akibat kegagalan semua pihak dalam mencapai jalan tengah (*win-win solutions*). Polarisasi terjadi ketika masing-masing pihak atau kelompok berupaya memperjuangkan kepentingan atau aspirasinya masing-masing tanpa adanya jalan tengah atau rekonsiliasi dalam mencapai kepentingan pada masing-masing pihak.

Polarisasi kepentingan ini kemudian menyebabkan segregasi (pemisahan) antara kelompok pada suatu insitusi. Kondisi ini menyebabkan dua dampak sekaligus, yaitu dampak positif berkaitan dengan terbentuknya kontrol yang efektif pada suatu insitusi, sedangkan dampak negatifnya adalah kegagalan dalam merumuskan suatu kebijakan secara akalamasi dan disetujui secara penuh oleh seluruh komponen institusi. Konsep polarisasi ini juga berlaku bagi kasus penolakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta.

Polarisasi kepentingan dalam kasus penolakan PKS atas program reklamasi Teluk Jakarta dapat difragmenkan menjadi dua, masing-masing PKS dan masyarakat nelayan sebagai entitas penolak dan pemerintah DKI Jakarta yang terindikasi terhubung dengan pengusaha reklamasi sebagai entitas pelaksana. Polarisasi ini terbentuk karena masing-masing pihak memiliki kepentingan dan adanya tahapan yang gagal dipenuhi secara sosial, ekonomi dan politik yang menyebabkan polarisasi ini terjadi dan tidak kunjung dapat terselesaikan.

Dugaan adanya kepentingan dari kelompok bisnis telah terlihat pada proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kawasan yang tersisa akibat pembangunan Pantai Indah Kapuk oleh PT. Mandara Permai tinggal sekitar 3,226 ha yang terdiri dari; 9, 25 ha hutan lindung (mangrove), cagar alam muara angke (Mangrove) 2,45 ha, hutan wisata 91,37 ha, kebun pembibitan kehutanan 10,47 ha, cengkareng drain 29,05 ha, jalur

¹⁷ Imam, *Hentikan Sementara Reklamasi di Utara Jakarta* (Jakarta: Intermedia, 2022)

transmisi PLN 29, 99 ha, serta jalan tol dan jalur hijau 911,7 ha. Semua yang tersisa ini akan habis jika reklamasi tetap diadakan.¹⁸

Kajian reklamasi teluk Jakarta sampai pada AMDAL (Analisis dampak Lingkungan) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dalam jabarannya menunjukkan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki luas kurang lebih 25 hektar, dengan volume 500.000 M3, panjangnya lebih besar dari 50 meter. Dengan pembangunan tersebut akan mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan, artinya perusakan dan penghilangan kawasan lindung akan terus terjadi. Dampak lain adalah reklamasi tidak terpadu hal ini terjadi karena reklamasi dilaksanakan diam-diam tanpa mempertimbangkan kaidah keterpaduan maupun kelayakan secara teknis. Dampak itu juga terjadi pada revitalisasi yang memarjinalkan. Reklamasi hanya menjadi domain bagi mereka yang mempunyai uang atau pihak swasta. Sedangkan penduduk setempat tidak akan mendapatkan dampak secara langsung.¹⁹

Berbagai kajian yang menunjukkan dampak negatif dari rencana reklamasi tersebut berujung pada surat keputusan tentang ketidaklayakan diadakannya reklamasi teluk Jakarta pada tahun 2003 oleh menteri lingkungan hidup. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dikarenakan adanya gugatan dari perusahaan pengembang yaitu PT. Bangunan Era Mulia, PT, Taman Harapan Indah, PT. Manggala Krida Yudha, PT. Pelabuhan Indonesia II, PT. Pembangunan Jaya Ancol dan PT, Jakarta Propertindo. Pada sidang PTUN tingkat pertama dan kedua, majelis hakim mengabulkan gugatan pengusaha. Dalam tingkat kasasi, Majelis Hakim memenangkan meter lingkungan hidup, namun pada peninjauan kembali, Mahkamah Agung memenangkan pengusaha. Sehingga hak pengelolaan tersebut dianggap sah untuk dilanjutkan.

Munculnya konflik antara masyarakat dengan kelompok bisnis menjadi persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari program reklamasi ini. Adanya dukungan dari pihak PKS menjadikan kelompok masyarakat ini berani untuk menyuarakan aspirasinya karena adanya partai oposisi yang mendukung, sehingga kelompok masyarakat yang di dominasi oleh para nelayan yang tinggal di Jakarta Utara ini berani menyuarakan sikapnya.

Sense giving dan *sense making* antara PKS dan masyarakat yang menjadi korban reklamasi berawal dari fenomena di rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang menjadi tempat relokasi warga korban penggusuran di berbagai wilayah berpotensi menjadi kantong-kantong kemiskinan baru. Bahkan kemiskinan yang dialami bisa lebih parah dari lokasi sebelumnya yang digusur. Demikian disampaikan Juru Bicara pasangan calon Anies-Sandi, Triwisaksana di Jakarta. Lebih jauh, pria yang kerab disapa Bang Sani ini mengatakan, hal ini disebabkan biaya hidup yang semakin tinggi di Rusunawa sementara pendapatan tidak bertambah, bahkan sebagian berkurang jauh. Ia juga mengungkapkan, menurut data BPS periode September 2015 - Maret 2016

¹⁸ Imam Mahdi, "Reklamasi Teluk Jakarta : Sebuah Perspektif Kekuasaan Dalam Ekonomi Politik", Jurnal Transformasi Global, Vol.4.No.1. 2017, h.39-44.

¹⁹ Imam Mahdi, "Reklamasi Teluk Jakarta : Sebuah Perspektif Kekuasaan Dalam Ekonomi Politik."

menunjukkan jumlah penduduk miskin meningkat pada periode dimana penggusuran banyak dilakukan.

Sense giving dan sense making menjadi bagian penting dari PKS untuk menindaklanjuti program reklamasi sebagai suatu momentum dan konflik kepentingan diantara kedua belah pihak. Adanya pihak yang setuju dan tidak setuju merupakan hal yang lazim terjadi dalam iklim demokrasi. Kesemuanya masih akan terus berkembang secara dinamis yang menyebabkan kebijakan reklamasi ini akan berjalan dengan berbagai respon.

D. KESIMPULAN

Dalam Penolakan fraksi PKS terhadap kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta kemudian dapat membawa berbagai dampak, yaitu hubungan antara PKS dan pemerintah DKI Jakarta yang semakin mengalami disparitas. Hubungan keduanya menjadi rengang ketika masing-masingpihak bersikukuh sebagai pihak yang benar dalam proyek prestisius tersebut. Meskipun demikian suara PKS sebagai oposisi dalam proyek reklamasi tetap kalah sebagai minoritas, namun dengan keputusan ini PKS semakin kokoh dalam memposisikan diri sebagai oposisi kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta.

Dampak selanjutnya atas penolakan PKS terhadap kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta adalah polarisasi kepentingan di internal DPRD DKI Jakarta. Hal ini terjadi akibat keputusan ini tidak ditanggapi secara beragam dan meskipun kekuatan PKS secara nasional relatif kecil, namun di DKI Jakarta, PKS memiliki kekuatan yang cukup potensial. Kondisi ini menjadikan munculnya konflik elit secara komunal ataupun individu terkait dengan penolakan kebijakan tersebut.

Dampak terakhir atas penolakan PKS terhadap kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta adalah terjadinya konflik kepentingan antara masyarakat *grass roots* dan kelompok bisnis. Kelompok masyarakat muncul sebagai entitas yang terdampak atas kebijakan reklamasi ini, yaitu masyarakat nelayan yang tinggal di sekitar wilayah reklamasi, serta masyarakat yang menggantungkan kehidupannya sebagai nelayan atas wilayah perairan utara Jakarta (Teluk Jakarta) yang sulit untuk memperoleh akses mata pencaharian pasca dibangunnya kebijakan reklamasi tersebut. Di sisi lain terdapat juga kelompok lainnyayaitu kelompok bisnis yang terlibat dalam kebijakan reklamasi tersebut sehingga menjadi bagian dari kesenjangan antara masyarakat *grass roots* dan kemudian dengan adanya sikap PKS dalam menolak kebijakan menjadi kekuatan dari masyarakat nelayan untuk melawan dominasi pelaku bisnis dalam kebijakan reklamasi tersebut. Di sisi lain pemerintah DKI berupaya menyingkapi kebijakan reklamasi untuk membangun masa depan DKI Jakarta, khususnya JakartaUtara dengan meminimalkan kerugian terkecil.

Saran

Agar meminimalisasi kerugian dari masyarakat, khususnya kalangan nelayan yang tinggal di wilayah pantai ini dengan memberikan kompensasi atau lahan

tempat tinggal yang tidak lepas dari wilayah pantai karena selama bertahun-tahun pantai dan masyarakat di sekitar pantai utara Jakarta menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan sebagai akibat pelaksanaan kebijakan reklamasi Teluk Jakarta. Agar masyarakat yang tinggal di sekitar perairan Teluk Jakarta hendaknya dapat membangun kehidupan baru dengan menyesuaikan aktifitas kerja sebagai nelayan di wilayah yang berbeda, serta mengembangkan skill dan keterampilan untuk mengurangi ketergantungan hidup dengan wilayah perairan. Agar PKS dapat mengembangkan afiliasi yang lebih luas kepada partai politik lainnya ataupun masyarakat yang lebih luas sehingga dapat menjadi penyeimbang pemerintah yang efektif.

REFERENSI

- Bennington, Charles E and William B. Porter. 2008. *Groundwater Research and Issue*. London: Nova Science Publishing.
- Christopher H Achen and Larry M. Bartels. 2017. *Democracy for Realists: Why Eceleition Produce Do Not Responsive Government*. London: Princeton University Press.
- David Easton and Luigi Garciano. 2002. *The Development of Political Science: A Comparative Survey*. London and New York: Routledge Publishing.
- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta :Gadjah Mada University Press.
- Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. "Struggle for Law Principles In Law Development", *Solid State Technology*, Volume: 63, Issue: 6 (2020), p.1869-1879.
- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Imam, Sohibul. 2022. *Hentikan Sementara Reklamasi di Utara Jakarta*. Jakarta: Intermedia.
- Mahdi, Imam. 2017. *Reklamasi Teluk Jakarta : Sebuah Perspektif Kekuasaan Dalam Ekonomi Politik*. *Jurnal Transformasi Global*, Vol. 4. No.1. 2017.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1.
- Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
- Setiaji. 2022. *Jejak Suram Reklamasi Jakarta: Dari Politik Sampai Kasus Suap*. Jakarta: Intermedia.

- Thea, Ady. 2022. *Mau Hentikan Reklamasi : Begini Opsi Hukum Versus Koalisi* Jakarta : Intermedia.
- Varma, SP. 2003. *Teori Politik Moderen*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Wibawa S dan Y. Prabuningrat. 1994. *Kebijakan Publik dan Analisis*. Jakarta: Intermedia, 1994
- Yuniawati, Lis. 2022. *Tolak Reklamasi Teluk Jakarta, Pilihan Nelayan Demo di PTUN*. Jakarta: Intermedia.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
- Yunus, N.R; Aprita, S. 2022. *Filsafat Pancasila*. Palembang, Noer Fikri Offset.
- Yunus, Nur Rohim; Aprita, Serlika; Suhendar, Suhendar. (2019). *Adagium Hukum: Aktualisasi dan Implementasi dalam Legal Research*. Jakarta: UIN Press.